

PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI YAMAN, SURIAH, DAN ALJAZAIR¹

PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN YEMEN, SYRIA AND ALGERIA

Muhammad Fakhry Ghafur

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta

E-mail: fakhry_jamahiriyya@yahoo.com

Diterima: 28 Juli 2015; direvisi: 10 September 2015; disetujui: 25 Oktober 2015

Abstract

The wave of democratization in the Middle East today has changed the political map of the region with the emergence of the power of political Islam, in the mean of political activity based on the principles of Islam both from the point of departure, the program, agenda and objectives. Nevertheless, in some countries there is still an attitude phobia against Islam. This shows the regime's efforts to return to authoritarianism or "backward bending prosses" as an example in Tunisia, Egypt, and Libya, where the military regime can return to political power. Similarly in Yemen, Ali Abdullah Saleh's regime was replaced by his deputy military, Abd Rabbuh Mansur Hadi, who must be driven by the separatist movement Al-Houti. Whereas in Syria the Islamic political forces are always under attack from the regime of Bashar Al-Assad which is still in power. As for the Algerian Islamic movements like the Muslim Brotherhood and Salafiyah, they form alliances and achieve a significant voice in the parliamentary elections in 2012 although the military regime may dominate the political life of the country. The phenomenon of the power of political Islam in Yemen, Syria, and Algeria will be the focus of this study.

Keywords: Political Islam, Yemen, Syria, Algeria.

Abstrak

Gelombang revolusi atau yang lebih dikenal dengan *Arab Spring* yang melanda Timur Tengah dewasa ini telah mengubah peta politik di kawasan tersebut dengan munculnya kekuatan politik Islam, dalam arti aktivitas politik yang didasari oleh prinsip-prinsip Islam baik dari titik tolak, program, agenda maupun tujuannya. Kendati demikian, di sejumlah negara masih saja ada sikap phobia terhadap Islam. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pembalikan kembali ke rezim otoritarianisme atau "*backward bending prosses*" seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya, dimana rezim militer dapat berkuasa kembali. Demikian juga di Yaman, rezim Ali Abdullah Saleh digantikan oleh wakilnya yang berhaluan militer, Abd Rabbuh Manshur Hadi, sampai akhirnya harus terusir oleh gerakan separatis Al-Houti. Sedangkan di Suriah kekuatan politik Islam kerap mendapat serangan dari rezim Bashar Al-Assad yang sampai saat ini masih berkuasa. Adapun di Aljazair –meskipun tidak melebihi gejolak politik seperti yang terjadi di Yaman dan Suriah- gerakan Islam yang terdiri dari Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafiyah membentuk aliansi dan meraih suara signifikan dalam pemilu parlemen 2012 meskipun pada akhirnya rezim militer dapat mendominasi kehidupan politik negara. Fenomena kekuatan politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair akan menjadi fokus kajian ini.

Kata Kunci: Politik Islam, Yaman, Suriah, Aljazair.

¹ Tim Peneliti terdiri dari: Muhammad Fakhry Ghafur (Koordinator), Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Indriana Kartini, dan Nostalgawan Wahyudhi.

Pendahuluan

Demokratisasi dan kebangkitan politik Islam merupakan dua fenomena yang layak untuk dikaji secara lebih mendalam dalam lingkup kajian Timur Tengah saat ini. Politik Islam dimaknai sebagai aktivitas politik kaum muslimin yang hendak menjadikan Islam sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Islam dijadikan acuan dalam setiap aktivitas sosial-politik yang mempunyai implikasi langsung terhadap kehidupan mayoritas penganutnya.

Dalam konteks pasca *Arab Spring*, keinginan untuk membangun sebuah tatanan yang lebih demokratis dan Islamis tampaknya sulit untuk dielakkan. Di Yaman, gerakan Islam seperti Ikhwanul Muslimin, Salafiyah, Anshar Syariah yang merupakan representasi dari partai Islah dan *Al-Qaeda in Arabian Peninsula* (AQAP), serta *Anshar Allah* dari kalangan Syi'ah Al-Houti menjadi pemain kunci dalam pertarungan politik yang berkepanjangan. Disamping itu, terbentuk kekuatan politik sebagai wadah aspirasi umat Islam melalui *Joint Meeting Parties* (JMP) yang merupakan koalisi antara partai Islam dengan partai Sosialis. Gerakan politik Islam di Suriah yang diwakili Ikhwanul Muslimin, Salafiyah, dan Jabhat An-Nushrah (*Al-Qaeda*) dan *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) menjadi motor dalam perlawanan terhadap rezim despotik-militer yang didukung oleh kelompok Syi'ah Alawiyah. Sementara di Aljazair, *Al-Qiyam Al-Islamiyyah* berperan cukup signifikan dalam membangun kultur Islamis dalam pemerintahan. Disamping itu, sikap represif rezim militer telah mendorong munculnya kekuatan politik Islam lainnya, seperti Tentara Islam Aljazair (MAIA) dan Front Penyelamat Islam (FIS) yang didirikan oleh sejumlah tokoh Ikhwanul Muslimin. Pengalaman politik Islam di beberapa negara kasus menunjukkan bahwa kelompok Islam dapat berperan dalam setiap proses politik yang terjadi, sebagai upaya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis pasca otoritarianisme.

Meskipun demikian, gejolak politik yang diwarnai dengan kekerasan politik masih terus berlangsung dalam skala luas dan upaya mengembalikan kejayaan rezim despotik masih terus berlangsung sebagaimana halnya rezim

Assad yang tidak kunjung terguling. Bahkan, di Aljazair, upaya “pendongkelan” rezim despotik oleh kekuatan demokrasi yang bergejolak sejak 1991, sampai kini masih belum memperlihatkan hasilnya. Lebih tragis lagi, pemimpin baru di Yaman, Abd Rabbuh Manshur Al-Hadi justru terusir oleh kekuatan pendukung rezim lama, sehingga upaya menuju Yaman yang demokratis masih sulit untuk terwujud. Realitas yang terjadi di tiga negara kasus ini mengindikasikan adanya upaya yang disebut “*backward bending process*” (proses pembalikan kembali) ke rezim otoritarian.

Tulisan ini mengkaji secara lebih mendalam seputar politik Islam di tiga negara kasus, yaitu Yaman, Suriah, dan Aljazair dengan berbagai dinamika dan problematikanya ditengah proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Tulisan ini dibagi dalam lima bagian. Pertama, membahas dinamika kultural dan politik di tiga negara kasus. Kedua, mengkaji problematika kekuatan politik Islam di Yaman. Ketiga, mengkaji problematika kekuatan politik Islam di Suriah. Keempat, mengkaji problematika kekuatan politik Islam di Aljazair. Terakhir, penutup dengan menyimpulkan dinamika demokrasi dan politik Islam di tiga negara kasus.

Sejarah Singkat Yaman, Suriah, dan Aljazair

Yaman merupakan salah satu negara di Jazirah Arab dengan peradaban tertua di dunia. Zaman dahulu Yaman wilayah kerajaan Saba' yang sangat tersohor dengan kekayaan alamnya. Namun, karena penguasaan dan eksplorasi bangsa lain yang melampaui batas, kini Yaman menjadi negara termiskin dengan rata-rata perkapita pertahun sebesar 800 dollar AS.²

Islam masuk ke Yaman pada tahun 630 ketika Nabi Muhammad Saw mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ajaran Islam di Sana'a.³ Pada saat itu, Yaman merupakan wilayah yang paling maju di Jazirah Arab.

² Sarah Phillips, *Yemen's Democracy Experiment in Regional Perspective: Patronage and Pluralized Authoritarianism* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 39.

³ “Menelusuri Sejarah Islam di Yaman,” *Republika*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/04/30/nmjwf-menelusuri-sejarah-islam-di-negeri-yaman-1>, diakses pada tanggal 1 Mei 2015.

Pada abad ke-16, Yaman dikuasai oleh Dinasti Usmaniyyah yang kemudian ditaklukkan oleh kelompok Syi'ah Zaidiyyah dibawah pimpinan Yahya Muhammad Hamiduddin. Sejak saat itu, kelompok Syi'ah Zaidiyyah menjadikan Yaman Utara sebagai pusat pemerintahannya.

Sepanjang sejarahnya, Yaman Utara dan Yaman Selatan kerap terlibat konflik. Yaman Utara mendapat dukungan dari Arab Saudi dan Yaman Selatan mendapat suplai senjata dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, Yaman Utara dan Yaman Selatan menyepakati penyatuan yang pada akhirnya disetujui oleh referendum pada Mei 1990. Presiden Ali Abdullah Saleh terpilih menjadi presiden pertama "Yaman Bersatu".

Kendati telah bersatu, kedua negara masih terus terlibat konflik. Hal tersebut juga tidak lepas krisis ekonomi di Yaman yang terjadi pada tahun 1991. Secara politik, terdapat upaya untuk menyatukan partai politik. Pada Mei 1993, dua partai yang berkuasa GPC dan YSP bersatu untuk membentuk partai tunggal, sehingga pada pemilu legislatif terdapat partai dengan suara mayoritas di parlemen. Pada tahun 1993, wakil presiden Al-Bayadh melakukan pemberontakan dan menyatakan membentuk Republik Demokratik Yaman baru yang berpusat di Aden. Akibatnya terjadi perang sipil antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Namun, pada 7 Juli 1994 pasukan Ali Abdullah Saleh berhasil menguasai Aden dan mengakhiri konflik. Untuk memperkuat posisinya, Presiden Saleh melarang keanggotaan partai politik dalam angkatan bersenjata dan melakukan amandemen konstitusi untuk menghapus Dewan Presiden.

Sementara itu, Suriah merupakan salah satu negara dengan peradaban paling tua di dunia. Kerajaan Semit pernah berkuasa di wilayah ini. Selain itu, Suriah dikenal sebagai jalur perdagangan, budaya, dan militer global, karenanya tidak heran jika Ferdinand Von Richtofen menyebut Suriah sebagai "Jalur Sutra". Pada masa kolonialisme Perancis, rakyat Suriah banyak mengalami penindasan. Aktivitas politik rakyat dibatasi dan diberlakukan secara diskriminatif. Pasca-Perang Dunia II pada tahun 1946, Suriah memperoleh kemerdekaannya.

Suriah pun berusaha untuk menumbuhkan rasa kesadaran nasionalismenya melalui

berdirinya partai Baath oleh Michael Aflaq dan Salahuddin Al-Bitar. Dengan prinsip *Al-Huriyyah* (kemerdekaan), *Al-Ittihadiyah* (Persatuan), dan *Al-Isytirakiyyah* (Sosialisme) mereka berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan dan persatuan di dunia Arab. Dibawah kekuasaan partai Baath yang didukung militer, Al-Bitar berhasil menarik dukungan kelompok Syi'ah Alawiyyah melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kelompok minoritas. Sejak saat itu, Syi'ah Alawiyah menjadi kelompok minoritas yang berhasil menguasai institusi dan lembaga pemerintahan.

Konflik dan kudeta pun kerap mewarnai panggung politik Suriah selama beberapa dekade, pada tahun 1966, Al-Bitar dikudeta oleh Salah Jadid. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi telah mendorong kelompok lain untuk melakukan kudeta. Pada November 1970, salah seorang pimpinan partai Baath, Hafiz Al-Assad melakukan kudeta militer tak berdarah. Hafiz Al-Assad kemudian disetujui sebagai presiden melalui referendum yang dilaksanakan pada Maret 1971. Di bawah tiga institusi yakni legislatif, eksekutif dan militer, Hafiz Al-Assad berhasil mengukuhkan kekuasaannya di Suriah.⁴ Kendati demikian, sikap diskriminatif terhadap kelompok lain dan lebih mengedepankan sekte Alawiyyah telah mendorong lahirnya perlawanan dari kelompok lainnya, termasuk dari Ikhwanul Muslimin. Sebagai akibatnya, kekuatan politik Islam diberangus pada masa pemerintahannya.

Pasca Hafiz Al-Assad tongkat kepemimpinan beralih ketangan putranya Bashar Al-Assad. Banyak kalangan memandang bahwa Bashar Al-Assad dapat melakukan reformasi politik dan ekonomi di Suriah. Hal tersebut ditunjukkan dengan ditandatangani "manifesto 99" oleh 99 tokoh terkemuka. Namun, dukungan tersebut berbuntut perlawanan setelah banyak para aktivis pro-reformasi dibunuh dan dipenjarakan. Pada Oktober 2005 terjadi gerakan oposisi terhadap pemerintahan Al-Assad yang menuntut dilakukannya reformasi secara total di Suriah. Puncaknya pada tahun 2011, seiring dengan fenomena "*Arab Spring*" yang menerjang

⁴ Raymond A. Hinnebusch, "Syria," dalam Shereen C. Hunter (Ed.), *The Politics of Islamic Revivalism Diversity and Unity*, (Indiana University Press, 2001).

sejumlah negara di Timur Tengah. Para aktivis pro-demokrasi menuntut mundurnya presiden Bashar Al-Assad dari kekuasaannya.

Sama halnya dengan Suriah, Aljazair adalah negara yang pernah dikuasai bangsa asing diantaranya adalah Perancis. Penyerangan Perancis berhasil merebut kota Algeir pada tahun 1830 dan menjadikan Aljazair sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Bercokolnya sindrom budaya Perancis di Aljazair memunculkan kekhawatiran dari kalangan muslim. Mereka khawatir budaya dan tradisi muslim di Aljazair akan rusak oleh budaya Perancis. Karenanya, umat Islam menjadikan Islam sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan melawan kolonialisme Perancis. Pada akhirnya semangat perlawanan anti kolonialisme dari kelompok Islam di Aljazair mengakibatkan munculnya disintegrasi antara umat Islam di satu sisi dan pemerintah kolonialisme pada sisi lain.⁵

Pada masa kemerdekaan, pemerintah mengontrol kegiatan keagamaan dengan alasan untuk tujuan konsolidasi nasional dan kontrol politik. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Islam adalah sumber hukum, tidak diperkenankan adanya aturan lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak aktivitas keagamaan yang dikontrol oleh pemerintah pusat. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak serta merta meredakan ketegangan antara umat Islam dan pemerintah rezim militer. Bahkan, gerakan perlawanan Islam semakin bermunculan. Pada tahun 1964, berdiri gerakan Islam *Al-Qiyam* yang menyerukan peran dominan Islam dalam segenap kehidupan. *Al-Qiyam* pun menolak segala bentuk praktik Barat dalam kehidupan sosial dan politik di Al-Jazair, sehingga memicu terjadinya konflik antara Islam militan dengan pemerintah militer. Intensitas konflik semakin meningkat sepanjang tahun 1980 sampai awal 1990-an.

Kelompok Islamis di Aljazair semakin berkembang setelah berdirinya Front Penyelamat Islam (*Front Islamique du Salut – FIS*) yang berhasil memenangkan suara terbanyak dalam Pemilu 1991. Tetapi, karena tidak dikehendaki, militer membatalkan hasil Pemilu dan memberangus FIS yang dianggap sebagai

⁵ Aziz Enhaili and Oumelkheir Adda, "State and Islamism in the Maghreb," *Meria Journal* 7:1, 2003, hlm. 66-76.

gerakan teroris. Dari sini dapat dilihat bahwa rezim otoriter-militer adalah musuh atau ancaman yang sesungguhnya bagi pertumbuhan demokrasi di negara-negara Timur Tengah.

Dinamika Kultural dan Politik di Tiga Negara Kasus

Dari segi religio-historis, mayoritas penduduk di tiga negara kasus menganut agama Islam dengan beragam sekte yang berkembang di masing-masing negara. Sebagai wilayah tempat lahir dan berkembangnya, Islam dapat dengan mudah menyebar ke seluruh pelosok Jazirah Arabiyyah. Karenanya, Islam menjadi agama utama yang dianut mayoritas penduduknya di seluruh negara Jazirah Arabiyyah. Di Yaman, sekitar 99,7 % penduduknya memeluk Islam, selain itu juga terdapat ajaran lainnya seperti Ismailiyyah (0,3%), Kristen (<0,1 %), Hindu (<0,1%), dan Yahudi (<0,1 %). Dari seluruh mayoritas penduduk yang beragama Islam sekitar 53% penganut Muslim Sunni dan 47% penganut Muslim Syiah Zaidiyyah.⁶ Sementara di Suriah, mayoritas penduduknya 87% adalah Muslim dengan presentasi sebesar 74% muslim Sunni dan 13%, Syi'ah. Sedangkan Kristen sekitar 9% dan Druz berjumlah 3%. Seperti halnya Suriah dan Yaman, mayoritas penduduk Aljazair 99% adalah muslim Sunni, sedangkan sisanya sebanyak 1 % adalah penganut Kristen dan Yahudi. Sementara itu, secara etnis mayoritas penduduk di tiga negara adalah etnis Arab.

Selain ajaran Islam yang menonjol, etnis menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam dinamika kehidupan politik di tiga negara kasus. Di Yaman, etnisitas menjadi faktor yang menentukan kehidupan politik nasional Yaman. Dominasi suku terefleksikan dalam kehidupan masyarakat Yaman, diantara suku-suku itu, pertama, adalah *Hashid* yang merupakan kabilah paling berpengaruh di Yaman. Yang termasuk suku Hashid adalah Al-Osaimat, Othar, Kharef, Bani Suraim, Hamdan dan Sanhan. Ali Abdullah Saleh berasal dari kabilah Hashid ini. Kedua, Bakil yang mempunyai populasi terbesar. Pemimpin suku ini berasal dari Lahoum dan Nihm yang terkonsentrasi di wilayah utara Sana'a. Yang termasuk dari konfederasi suku ini adalah

⁶ Lihat <http://looklex.com/e.o/yemen.religions.htm>.

Khawlan, Arhab, Al-Hada, Al-Jidaan, Anis, Dihm, Bani Mata, dan Al-Haimatyeeen. Terakhir adalah Madhaj yang terkonsentrasi di bagian tengah wilayah Yaman. Yang termasuk dalam kabilah ini adalah Ans, Az-Zaraniq, Al-Awaliq, Kaifah, Al-Bakzm, Al-Sabyha, Al-Abadil, Al-Hasani dan Al-Fadhli. Ketiga konfederasi suku dengan berbagai kelompoknya menunjukkan bahwa Yaman sangat identik dengan kesukuan/kabilah. Bahkan, diantara mereka ada yang berkonflik dalam memperebutkan sumber daya alam yang menyangkut perbedaan pendapat, distribusi sumber daya yang tidak merata dan manfaat dari proyek-proyek pembangunan.

Akar politik Islam di Yaman dapat dirunut pada tahun 1960-an yang ditandai dengan kelahiran Ikhwanul Muslimin (IM). Kemudian muncul gerakan sosial Islam pada tahun 1970, ketika Yaman masih terpecah. Saat itu, para ulama khawatir akan dominasi sosialis dan atheis yang didukung Uni Soviet. Karenanya, Syaikh Abdul Majid Az-Zindani membentuk sistem pendidikan di Yaman Utara untuk membendung gerakan anti-Islam di Yaman Selatan. Untuk menjalankan partai Al-Islah, Ali Abdullah Saleh yang merupakan pemimpin partai menggandeng Syaikh Abdul Majid Az-Zindani dan Syaikh Abdullah Al-Ahmar. Dengan bergabungnya dua Syaikh, maka ada kekuatan sosial-politik yang mendukung kekuasaan Saleh melalui partai Al-Islah. Belakangan IM bergabung dengan partai Al-Islah untuk mengekspresikan sikap politiknya. Dengan demikian, selain suku, para ulama (syaikh), IM turut berperan dalam membesarkan partai Al-Islah. Sementara itu, Suriah adalah negara dengan masyarakat “mosaik”, terdiri dari beragam agama dan mazhab. Mayoritas adalah muslim Sunni dengan jumlah populasi sebesar 74% yang terdiri dari beragam mazhab, seperti Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Beberapa diantaranya juga menganut aliran tarekat termasuk Naqsabandiyyah dan Qadariyyah. Sementara Muslim lainnya beraliran Syiah Alawiyah, Nusairiyyah, Ismailiyyah, dan Yazidi. Sisanya sekitar 13% adalah komunitas minoritas yang terdiri dari Kristen sebesar 10% dan Druze sekitar 3%.⁷

⁷ Sheeren T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2001).

Selama berabad-abad umat Islam berperan penting dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Suriah serta berkontribusi besar dalam menetapkan nilai-nilai dasar negara. Islam hadir di Suriah sejak abad ke-6 pasca Khalid bin Walid berhasil menaklukkan wilayah Asy-Syam. Sejak saat itu Islam berkembang dan menjadi bagian dari kekhalfahan Turki.

Pada masa kolonialisme Perancis, hukum Islam pernah dijadikan hukum negara sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan rezim. Sejak lama, umat Islam Suriah kerap menyerukan penetapan Islam sebagai sumber hukum negara, namun selalu mendapat penolakan dari rezim penguasa. Barulah ketika Syiah Alawiyyah berhasil mendominasi pemerintahan, Islam dijadikan sumber hukum dan undang-undang negara. Sejak tahun 1973, Suriah menetapkan dua sistem pengadilan yang berdasarkan Syariah bagi umat Islam dan pengadilan masing-masing agama dengan menggunakan hukum masing-masing agama.

Kendati demikian, umat Islam dari kalangan Sunni kerap mengalami diskriminasi dan tindakan kekerasan. Pemerintah menetapkan hukum Islam tidak lain untuk membela kepentingan kelompok Syiah Alawiyyah sehingga memicu penolakan dari kalangan muslim Sunni. Selain itu, dominasi kelompok minoritas Syiah atas partai Baath dan institusi militer telah berhasil menguasai kehidupan politik Suriah yang mayoritas penduduknya beraliran Sunni.

Perseteruan kerap terjadi dalam skala luas antara muslim Syiah yang mendukung pemerintah dengan muslim Sunni yang mendukung kelompok oposisi Suriah, antara kelompok Islam Sunni yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin (IM), Salafiyyah, dan Al-Qaeda. Di samping itu, meruncingnya perbedaan sekte menjadikan pemicu semakin meluasnya konflik di Suriah. Sebagai contoh, konflik antara gerakan yang ingin menegakkan syariat Islam di Suriah dengan etnis Kurdi di Kobane serta konflik antara rezim militer Assad dengan milisi Kurdi di Utara Suriah yang telah berlangsung lama.

Adapun di Aljazair, Islam sejak lama menjadi pengobar semangat anti kolonialisme, terutama sejak dibawah kekuasaan Perancis.

Front Kemerdekaan Nasional (*Front de Liberation Nationale* – FLN) kerap menggunakan kekuatan pemersatu Islam untuk memperkuat barisan nasional dalam melawan penjajah. Pasca kemerdekaan, pemerintah berusaha mempersatukan kelompok Islam, meskipun tidak sepenuhnya dapat berhasil dilakukan. Hal ini, dapat dilihat dari banyaknya gerakan Islam independen yang melahirkan partai oposisi sekitar tahun 1980-an dan awal 1990-an.

Munculnya Front Penyelamat Islam (*Front Islamique du Salut* – FIS) pada 16 September 1989, menunjukkan bahwa rezim penguasa tidak dapat mengontrol tumbuh suburnya gerakan politik Islam yang dapat bersaing dengan FLN. Sampai akhirnya, FIS dapat menjadi partai alternatif dengan basis massa yang cukup besar karena program politiknya yang menawarkan solusi sosial, politik dan ekonomi serta keagamaan. Karenanya, pada saat krisis ekonomi menerjang Aljazair, disaat pemerintah tidak dapat mengatasinya, kelompok Islam dapat muncul dengan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakat umum. Komitmen politik semacam ini justru menguntungkan aspirasi politik gerakan Islam.

Pemimpin FIS adalah Syaikh Abbasi Madani, seorang profesor berpendidikan Barat yang moderat dari Universitas Aljazair. Sementara wakilnya adalah Ali Belhadz yang terkenal dengan retorikanya tentang gagasan radikal tentang peran Islam politik. Pada awal berdirinya FIS program politiknya lebih bersifat pluralis dan moderat yang banyak didukung oleh kelompok kelas atas, namun pasca dibubarkan oleh militer muncul radikalisasi dalam kelompok ini. Sebenarnya, radikalisasi ini muncul akibat sikap represif rezim militer sehingga menimbulkan perlawanan dari kelompok Islam. Sehingga, sampai saat ini FIS dianggap sebagai gerakan radikal yang dilarang keberadaannya di Aljazair.

Berdasarkan spektrum pengalaman sejarah dinamika sosial, politik, dan kultural dari tiga negara kasus diatas, pembahasan pada bab selanjutnya akan difokuskan pada beberapa hal, pertama, problematika kekuatan politik Islam di Yaman. Kedua, kekuatan politik Islam di tengah konflik sektarianisme di Suriah. Ketiga,

politik Islam, otoritarianisme-militer dan krisis legitimasi di Aljazair.

Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman

Yaman adalah salah satu negara di Timur Tengah yang diterpa *Arab Spring* 2011. Gerakan protes di Yaman, diawali dengan tuntutan reformasi politik dan ekonomi yang meliputi perbaikan kondisi ekonomi, pemberantasan korupsi dan pengangguran.

Kondisi perekonomian Yaman dalam beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Penduduknya hidup dalam kemiskinan dimana hampir setengah populasi di Yaman berpenghasilan kurang dari 2 dolar perhari dan sepertiga penduduknya menderita kelaparan. Dengan kondisi seperti ini, Yaman berada pada peringkat keempat negara terendah dalam *Human Development Index* setelah Sudan, Djiboti, dan Mauritania.⁸ Yaman pun terancam menjadi negara gagal (*failed states*) yang berdasarkan *The Failed States Index* menempati posisi kedelapan.⁹

Puncak dari tuntutan para demonstran di Yaman adalah mundurnya presiden Ali Abdullah Saleh. Pada 23 November 2011, akhirnya Ali Abdullah Saleh menandatangani perjanjian yang diprakarsai oleh Dewan Kerjasama Teluk (*the Gulf Cooperation Council* – GCC). Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Saleh akan melakukan transfer kekuasaan kepada wakilnya Abdurrabu Manshur Al-Hadi. Perjanjian tersebut juga menghasilkan kesepakatan dengan pembentukan *national unity government* yang terdiri dari koalisi antara *General People's Congress* (GPC) dan *Joint Meeting Party* (JMP) yang terdiri dari partai Al-Islah dan partai Sosialis Yaman (*Yemen Socialist Party*-YSP). Transfer kekuasaan ini menambah daftar panjang pergantian rezim di Timur Tengah setelah Ben Ali di Tunisia, Muammar Qaddafi di Libya, dan Husni Mubarak di Mesir.

Berbagai kalangan mengutuk sikap represif rezim tersebut dan menyerukan presiden Ali

⁸ "Human Development Index and Its Components", http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1_reprint.pdf

⁹ "The Failed States Index 2012," http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive.

Abdullah Saleh mundur dari kursi presiden. Seorang pemuda bernama Tawakul Karman menjadi motor gerakan pemuda dalam menentang kebijakan represif rezim sampai akhirnya presiden Saleh tertekan dan menyetujui transfer kekuasaan kepada Abdurrabu Manshur Al-Hadi.¹⁰ Pada awalnya, protes kelompok pemuda berjalan dengan damai namun sikap represif militer terhadap para demonstran telah menyebabkan aksi damai berubah menjadi konflik bersenjata. Salah seorang jenderal pengikut Saleh membelot mendukung para demonstran sehingga menambah kompleks konflik antara para demonstran dengan militer rezim.

Semakin kompleksnya konflik di Yaman disebabkan tidak seragamnya gerakan protes rakyat. Ada dua pihak militer yang ikut terlibat. Pertama, adalah kelompok pendukung rezim Saleh, kedua, pendukung demonstran. Situasi semakin memanas ketika diantara kubu militer didukung oleh kekuatan suku yang telah terlibat konflik sejak lama dan menguasai persenjataan yang mengakibatkan konflik di Yaman semakin kompleks. Hal ini dapat dilihat dari konflik antara rezim militer Saleh dengan pimpinan suku Hashid, Syaikh Sadeq Al-Ahmar sehingga memicu serangan dari para milisi pendukung Syaikh Sadeq. Dalam pertempuran tersebut menyebabkan tewasnya ratusan orang dan menyebabkan semakin meningkatnya konflik senjata di Yaman.

1. Dinamika Politik di Yaman

Selain kaum muda, partai politik yang muncul pasca unifikasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam dinamika politik Yaman. Namun demikian, menganalisis politik terkini di Yaman tidak bisa hanya dilihat melalui kepentingan partai politik yang berkembang di Yaman baik partai pemerintah (GPC) maupun oposisi (JMP), karena baik GPC maupun JMP tidak mempresentasikan pembagian kekuasaan politik secara utuh. Partai penguasa saat ini yang terdiri dari partai koalisi merupakan oposisi bagi rezim Saleh, sementara di sisi lain Saleh mendapat dukungan dari berbagai faksi yang loyal mendukung pemerintahannya. Disamping

itu, kesukuan (tribalisme) yang mendominasi politik Yaman menjadikan pertarungan politik di Yaman semakin kompleks terutama dengan hadirnya kelompok Syi'ah Al-Houti yang sejak lama melakukan pemberontakan terhadap pemerintah.

Pada awalnya, kelompok Al-Houti melakukan perlawanan di provinsi Sa'adah pada 2004 tatkala demonstrasi anti-pemerintah dilakukan oleh gerakan *Shabab Al-Mu'min* yang mengkritik kerjasama pemerintah dengan AS dalam kontraterorisme. Akibatnya pemerintah berusaha menangkap pemimpin Al-Houti, Hussein Badr Ad-Din Al-Houti yang mengakibatkan pertempuran yang panjang sampai saat ini.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas, sebagai partai penguasa GPC, merupakan partai politik yang didirikan pada 1982 untuk menggalang dukungan terhadap Ali Abdullah Saleh untuk menjadi presiden Republik Arab Yaman. Penyelenggara partai terdiri dari berbagai kalangan baik kaum elite sosial seperti syaikh, pemimpin intelektual, para pebisnis yang kesemuanya mempresentasikan berbagai kekuatan baik moderat, tradisional dan suku. Meski demikian, kelompok yang paling kuat adalah yang memiliki kedekatan personal dengan presiden. Sementara anggotanya terdiri dari berbagai kelompok termasuk kelompok Islam, sosialis, pemimpin suku, tokoh agama moderat sampai konservatif.¹¹

Sementara itu, kubu oposisi di Yaman dikenal dengan *the Joint Meeting Party (JMP)* yang merupakan koalisi berbagai partai oposisi terutama partai Islam Al-Islah dan partai Sosialis Yaman (*Yemen Socialist Party-YSP*) yang berkuasa pada era *the People's Democratic Republic of Yemen (PDRY)*. Aliansi partai koalisi ini terus bertahan sampai tahun 2002.

Partai Al-Islah adalah partai Islam terbesar di Yaman yang tergabung dalam koalisi JMP. Meski demikian, JMP adalah partai yang plural dengan beragam kelompok di dalamnya. Partai ini dibentuk pada September 1990 oleh mantan anggota GPC sebagai rumah baru bagi kelompok

¹⁰ Apriadi Tambukara, *Revolusi Timur Tengah*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2011).

¹¹ A.A.H. Al-Yemeni, *The Dynamics of Democratization: Political Parties in Yemen*, (Bonn: Freidrich Ebert Stiftung, 2003), hlm. 26.

Islamis untuk memarginalkan partai Sosialis Yaman. Sejak tahun 1990 sampai 1997, Islah memelihara hubungan dekat dengan partai berkuasa GPC dan tergabung dalam kabinat yang dibentuk pemerintah.

Partai Islam terdiri dari koalisi beberapa kekuatan. Pada masa awal terdiri dari kekuatan suku, Ikhwanul Muslimin moderat dan radikal. Kelompok radikal diwakili oleh Abdulmajid Az-Zindani. Meskipun ideologi dan mayoritas anggotanya mewakili IM, namun komponen suku sangat berperan dalam pembentukan partai dan memiliki ikatan kuat dengan GPC. Karenanya, kelompok Islam di Yaman pun tidak bisa lepas dari bayang-bayang kesukuan. Pemimpin keagamaan atau ulama kerap memiliki ikatan emosional dengan kelompok suku asalnya, seperti halnya Syaikh Abdullah Al-Ahmar yang merupakan pemimpin partai Islah yang mempunyai hubungan dengan suku Hashid dan pemimpin suku Sanhan yang merupakan suku asal presiden Saleh. Selain itu, dalam tubuh Al-Islah terdapat kelompok Salafiyah yang tidak mendukung Az-Zindani, termasuk kelompok Zaidiyah yang memprotes upaya elit partai menghalangi partai dari kubu Syiah menempati posisi penting dalam partai.

Sedangkan partai lainnya adalah *The Yemen Socialist Party* (YSP) meskipun terdapat perbedaan pendapat antar anggotanya, partai ini sangat ideologis terutama dalam menciptakan perubahan dalam tubuh partai dari Marxist menjadi sosialis. YSP berkembang melalui gerakan komunis yang berkembang menjadi gerakan anti kolonial pada akhir tahun 1960-an. Selanjutnya YSP mulai mengalami perubahan setelah Sekjen partai, Jarallah Omar mengedepankan wajah pluralistik partai. Kendati demikian pasca unifikasi, YSP menegaskan kembali sebagai partai sosialis dan pada Pemilu 1993 menyatakan sebagai partai sosialis demokrat.

2. Kekuatan Politik Islam dan Intervensi Asing

Kelompok Islam di Yaman terbagi dalam beberapa kekuatan utama, diantaranya Ikhwanul Muslimin yang diwakili partai Al-Islah, Salafiyah, Anshar Syariah yang merupakan representasi dari Al-

Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), dan Anshar Allah yang diwakili kelompok Al-Houthi.¹²

Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam yang kuat diantara kelompok Islam lainnya, khususnya dalam sosial, politik, ekonomi, media dan diplomatik. IM memiliki basis dukungan massa yang banyak meliputi suku, pebisnis, militer dan politisi. Ulama yang juga dari IM adalah Syaikh Ali Abdullah Ahmar dan anaknya, Sinnan Abu Lahhum, komandan militer Ali Muhsin Al-Ahmar yang didukung setengah pasukan Yaman.

Partai Islah adalah representasi dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang juga merupakan koalisi dari beragam pemimpin suku konservatif. Islah adalah partai utama di JMP, sehingga banyak kebijakannya yang mendukung langkah-langkah pergerakan IM. Pasca runtuhnya Saleh, Islah mulai mengambil peran dalam posisi sentral dalam proses politik. Hal ini menjadikan partai Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun politik pada masa transisi, bahkan banyak dari kelompok IM yang menjadi penggerak dalam revolusi Yaman.

Selain IM, Salafiyah adalah gerakan Islam yang sejak lama berkembang di Yaman. Sebagaimana namanya, gerakan ini menyerukan untuk kembali kepada ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad dan ulama *Salaf Ash-Shalih*. Kelompok ini diwakili oleh Salafi Jihadi anti pemerintah, tradisionalis yang pro-pemerintah. Disamping itu, berdasarkan aktivitasnya, Salafi dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok *mainstream* yang dekat dengan pendiri Salafi radikal, Syaikh Muqbil Al-Wadi'i, kedua, *The Wisdom Society Movement* yang dipengaruhi oleh Syaikh Abdul Rahman Abdul Rahman Abdul Khaliq dari Mesir. Ketiga, *The Ihsan Society* yang dipengaruhi oleh salah seorang Syaikh dari Suriah. Selain itu, terdapat juga Salafi non-radikal yang dipimpin Yahya Al-Hajuri dari Institut Daarul Hadits di Dammaj. Gerakan Salafi ini berusaha untuk menstigmatisasi revolusi kaum muda termasuk Ikhwanul Muslimin. Kelompok Salafi politik ini memandang proses revolusi

¹² Mouna Succarieh, diterjemahkan oleh Rani Geha, "Rise of Radical Islam in Yemen Altering Its Tribalism", <http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/09/weekenda-detailed-look-at-islamism-in-yemen.html#>.

Yaman sebagai kesempatan baru untuk ikut terlibat dalam ruang politik. Melalui revolusi Yaman, anggota asosiasi Hikma dan Ihsan, terinspirasi oleh keberhasilan partai An-Nour di Mesir, mengumumkan proyek untuk membentuk partai Islam dan berpartisipasi dalam pemilu.

Sementara itu, Al-Qaeda adalah gerakan Islam yang pertama kali muncul di Yaman sebagai cabang dari Al-Qaeda Arab Saudi pada tahun 2003 yang fokus dalam jihad terhadap musuh Islam dan keluarga Sa'ud. Al-Qaeda di Yaman muncul pada awal 1990-an, ketika para kolega Osama bin Laden kembali dari Afghanistan. Kelompok ini banyak melakukan aksi kekerasan terutama pada fasilitas militer asing, termasuk pemboman kapal USS Cole di Aden pada tahun 2000. Sampai pada tahun 2006, Al-Qaeda di Yaman tidak menjadikan pemerintah Yaman sebagai target utama. Namun, faktor tekanan asing terutama AS, masalah ekonomi dan kebutuhan akan bantuan mengakibatkan semakin meningkatnya perlawanan pemerintah terhadap para pejuang Al-Qaeda. Pada tahun 2009, Al-Qaeda mengumumkan bahwa operasi jihad di Saudi dan Yaman digabungkan menjadi AQAP dibawah komando Nasir Al-Wuhayshi.

Adapun kelompok Syiah diwakili oleh kelompok Al-Houthi yang kerap melakukan konfrontasi dengan pasukan pemerintah. Keluarga dan pengikut Al-Houthi dituduh melakukan makar untuk mengganti negara republik menjadi negara yang berdasarkan sistem keimaman. Tuduhan ini disangkal oleh Al-Houthi yang mengkritik rezim Presiden Saleh yang dianggap korup, terlalu dekat dengan AS, dan lebih dekat dengan kelompok Wahabi-Salafisme melawan komunitas lokal dan tradisional. Pada tahun 2009, kelompok Al-Houthi memperluas basis perlawanan sampai ke wilayah Saudi dengan alasan bahwa Saudi telah mendorong pasukan Yaman untuk melakukan serangan ke basis Al-Houthi di perbatasan. Ada indikasi bahwa Saudi menggunakan wilayah perbatasannya untuk membantu pasukan Yaman berperang melawan militan Al-Houthi.

Secara historis kebijakan Arab Saudi di Yaman didorong oleh beberapa faktor, antara lain wilayah perbatasan sepanjang 1800 km yang kerap menimbulkan permasalahan. Garis tegas perbatasan menjadi faktor permasalahan

pada akhirnya didemarkasi pada Juni 2000 ketika Yaman menerima kedaulatan Saudi atas beberapa wilayah seperti Asir, Najran, dan Jizan. Sementara itu, Arab Saudi tetap memperkuat basis militernya di perbatasan, karena khawatir terhadap masalah penyelundupan narkoba, migran ilegal untuk mencari kerja di Arab Saudi.

Selain itu, Saudi juga waspada terhadap semakin berkembangnya kekuatan Al-Houthi dan mencurigai adanya keterkaitan antara Al-Houthi, Iran, dan Al-Qaeda yang dianggap menjadi ancaman regional. Kendati demikian, banyak pihak yang meragukan keterlibatan Iran dalam konflik terbuka di Yaman, karena belum adanya bukti keterlibatan Iran dalam membantu milisi Al-Houthi. Seperti yang diungkapkan oleh Ginni Hill dan Gerd Nonneman, dalam "*Yemen, Saudi Arabia and the Gulf States : Elite Politics, Street Protests and Regional Diplomacy*", menyatakan bahwa Saudi mengakui kepada pihak AS bahwa pemerintahannya membesar-besarkan keterlibatan Iran.¹³ Kepedulian Saudi tersebut mendorong keterlibatan cukup signifikan dalam persoalan Yaman sejak beberapa dekade.

Sementara itu, GCC adalah organisasi antar negara yang terdiri dari negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Meski organisasi ini tidak besar, namun GCC menunjukkan kekuatan kolektifnya terutama dalam negosiasi dengan Uni Eropa terkait bantuan ekonomi dan politik bagi Yaman. Mundurnya presiden Saleh dari kursi presiden tidak lepas dari peran GCC yang memaksa Saleh untuk melakukan transfer kekuasaan.

AS merupakan salah satu negara yang fokus pada masalah ancaman keamanan kawasan, menyusul banyaknya serangan yang dilakukan Al-Qaeda terhadap fasilitas militernya. Kepedulian AS terhadap Yaman mulai meningkat terutama pasca peristiwa 11 September 2001. Kendati demikian, hubungan antara kedua negara tidak berjalan mulus seiring dengan sikap ragu pemerintah Yaman dalam memberantas

¹³ Ginni Hill & Gerd Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia and the Gulf States: Elite Politics, Street Protests and Regional Diplomacy", *Chatham House Middle East and North Africa Programme Briefing Paper* No. 2011/01, Mei 2011, http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/19237_0511_yemen_gulfbp.pdf, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.

kelompok Al-Qaeda. Meningkatnya serangan Al-Qaeda di Yaman pada tahun 2009, mendorong AS untuk menetapkan beberapa strategi, diantaranya adalah komitmen untuk memberantas AQAP dalam jangka pendek, meningkatkan bantuan pembangunan jangka panjang dan menggalang dukungan internasional untuk menstabilisasi keamanan negara. Bantuan pembangunan dan keamanan AS pun berangsur meningkat yang pada tahun 2008 sebesar 17,2 juta dolar menjadi 40,3 juta dolar pada tahun 2009. Meskipun demikian, beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah kelompok militan di Yaman berkisar antara 300-500 hingga beberapa ribu orang saja yang menunjukkan masih belum kuatnya kekuatan Al-Qaeda di Yaman. Kelompok ini pun belum memiliki afiliasi dengan partai politik, faksi militer maupun organisasi masyarakat sipil yang memfasilitasi AQAP untuk bekerjasama dengan kelompok suku.

Berbeda dengan Al-Qaeda, kelompok separatis Al-Houthi justru semakin menunjukkan kekuatannya. Pada 21 September 2014, kelompok ini berhasil menguasai kota Sana'a sekaligus berhasil mengusir presiden Abdurrahman Mansur Al-Hadi dari istana kepresidenan dan melemahkan pengaruh elit politik rezim Saleh. Tidak hanya itu, kelompok Al-Houthi juga menuntut digantinya PM Mohammed Salem Basindwa yang dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.

Keberhasilan kelompok Al-Houthi tidak lepas dari melemahnya kekuatan politik keluarga Al-Ahmar sebagai pendukung utama pemerintah. Lemahnya posisi keluarga Al-Ahmar berpengaruh bagi partai Islah yang menguasai beberapa pos kementerian. Selain itu, dengan melemahnya kekuatan Islam juga berpengaruh pada posisi Ikhwanul Muslimin sebagai basis pendukung utama partai Islah terlebih upaya Arab Saudi untuk membendung menyebarnya pengaruh IM di kawasan.

Problematika Kekuatan Politik Islam di Suriah

Sebagai negara yang berlandaskan nasionalisme, kebebasan, dan sosialisme, para pemimpin di Suriah telah berusaha untuk mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial-politik dan ekonomi. Di bidang politik, ideologi

tersebut telah menjadikan partai Ba'ath menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan kekuasaan rezim. Pada masa Hafiz Al-Assad Partai Ba'ath dan institusi militer mendapat posisi strategis dalam pemerintahan.¹⁴ Relasi antara rezim, Partai Ba'ath dan institusi militer memicu terjadinya gerakan perlawanan dari kelompok oposisi. Tradisi kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh putranya Bashar Al-Assad. Pada masanya kolaborasi antara Partai Ba'ath dan militer semakin kuat terlebih pemerinthan Assad dapat mensinergiskan empat pilar, antara lain, mempersatukan kelompok minoritas, mengontrol secara penuh aparatur militer-intelejen, memonopoli kepemimpinan Partai Ba'ath serta meneguhkan kembali undang-undang darurat yang ditetapkan pada tahun 1962. Undang-undang tersebut telah memberikan kekuasaan yang hampir tanpa batas pada Partai Baath. UU inilah yang kemudian ditentang oleh berbagai kelompok pro-reformasi termasuk dari kalangan Islam-Sunni. Aksi protes tersebut dibalas dengan serangan besar-besaran militer rezim ke basis kelompok oposisi yang mengakibatkan tewasnya ratusan ribu warga sipil. Sistem politik otoriter rezim Al-Assad menjadi penyebab munculnya perlawanan dari kelompok politik Islam di Suriah.

1. Kekuatan Politik Islam di Suriah

Kelompok Islam adalah penentang utama rezim Al-Assad, seperti Ikhwanul Muslimin dan organisasi yang tergabung dalam gerakan sayap militernya, Salafiyah, Al-Qaeda, dan kelompok Sufi serta para ulama yang juga turut berperan dalam kehidupan sosial-politik di Suriah. Ikhwanul Muslimin (IM) adalah gerakan Islam yang paling getol menentang politik diskriminasi rezim Al-Assad. IM sudah sejak lama eksis dalam dinamika politik dan konflik di Suriah. Bahkan dalam kajian *The Arab Centre for Research and Policy Studies* IM disebut sebagai pemain kunci dalam pergolakan politik di Suriah pada saat ini. Hal itu tidak lepas dari pengaruh IM sebagai gerakan Islam yang mempunyai akar yang cukup kuat dengan keanggotaannya yang luas hingga mampu berafiliasi dengan gerakan

¹⁴ Amos Perlmutter, *The Roles of Military and Rules Politis*, (London: Frank Cass and Company Limited, 1981).

Islam lainnya, seperti Anshar Asy-Syariah dan Jabhat An-Nushra. Selain itu, para ulama besar mempunyai ikatan yang kuat dengan gerakan ini, sebut saja misalnya Musthafa Ash-Shiba'i, Syaikh Al-Bayouni dan Syaikh Said Hawa seorang ulama yang kerap menentang konstitusi sekuler di Suriah. Karya-karya Said Hawa menjadi referensi para aktivis IM di seluruh dunia.

Selama beberapa dekade, gerakan IM Suriah memiliki strategi yang berbeda dari masa ke masa. Pada tahun 1950, IM mulai aktif dalam politik praktis dengan masuknya sejumlah aktivis dalam institusi dan badan pemerintahan. Namun, munculnya dominasi Partai Baath dalam pemerintahan dan menguatnya nasionalisme Arab membuka lembaran baru dalam konfrontasi antara IM dengan rezim militer yang kemudian menciptakan kesenjangan dan konflik yang berkelanjutan.

Salafiyyah menjadi gerakan yang juga berperan dalam politik di Suriah. Pada awal terjadinya gejolak politik di Suriah pada 2011, kehadiran Salafi di Suriah mengambil bentuk yang beragam dengan munculnya faksi-faksi Salafiyyah. Diantara tokoh Salafi yang muncul di Suriah adalah Jamal Al-Qasimi, Muhammad Rasyid Ridha yang pindah dari Mesir ke Suriah, dengan karyanya yang monumental yakni tafsir Al-Manar yang memberikan inspirasi bagi kelompok Islam di dunia, serta Muhammad Nassiruddin Al-Albani yang merupakan tokoh Salafi yang berpengaruh di Suriah.¹⁵ Namun karena konfrontasi antara rezim militer dengan kelompok oposisi banyak ulama yang mengasingkan diri ke luar Suriah. Pada November 2011, gerakan Salafiyyah menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap rezim.

Diantara faksi Salafi, *Islamic Front* adalah gerakan yang paling menonjol dan paling luas basis dukungannya. *Syria Islamic Front*, didirikan pada Juli 2012 yang terdiri dari sebelas sayap militer, antara lain *Harakah Ahrar Ash-Sham*, *Harakah Al-Fajr Al-Islamiyyah*, *Liwa Al-Haq*, serta *Jama'ah At-Taliah Al-Islamiyyah*.¹⁶ Tujuan

¹⁵ Abdurrahman Al-Haj, *Ad-Da'wah wal Jama'ah, At-Tathallu'at lil Jama'at Ad-Diniyyah fi Suria*, (Al-Markaz At-Tawasul wa Abhats As-Stratijiyyah, 2012).

¹⁶ Mohammad Abu Rumman, *Islamists, Religion, and The*

dari gerakan-gerakan ini adalah melengserkan rezim Al-Assad dan membangun masyarakat Suriah yang dilandasi nilai-nilai Islam. Dari sini dapat dilihat bahwa, *Islamic Front* memiliki tujuan dan ideologi yang berbeda dengan Al-Qaeda maupun ISIS. Faksi *Islamic Front* yang terkemuka adalah *Ahrar Ash-Sham* dibawah komandan Hassan Abu Abdullah. Kelompok ini memiliki basis kekuatan di Aleppo, Edlib dan wilayah utara. Sementara faksi Salafi lainnya, *Liwa At-Tauhid* fokus pada resolusi konflik dan misi kemanusiaan di beberapa daerah. Selain itu, ISIS merupakan salah satu dari faksi Salafi Jihadis yang paling terkemuka di Suriah. Kehadiran ISIS mendorong sejumlah eksponen radikal di tubuh sejumlah gerakan Islam lainnya untuk bergabung. Diantara gerakan Islam terbesar di Suriah yang bergabung dengan ISIS adalah Jabhat An-Nushra. Sebelum ISIS muncul, Jabhat An-Nushra adalah salah satu gerakan Islam terbesar di Suriah. Bahkan, dalam perlawanan terhadap rezim, gerakan ini mempunyai peran yang signifikan di Suriah dibandingkan dengan *Free Syrian Army* (FSA) yang hanya memiliki basis di Aleppo, sementara An-Nushra mempunyai basis dukungan yang luas meliputi Damaskus, Hama, Hams, dan Ar-Raqqa. Kesamaan ideologi antara An-Nushra dan ISIS mendorong para anggota An-Nushra untuk bergabung dengan ISIS dalam melawan AS dan sekutunya di Irak dan Suriah. Meskipun pada akhirnya banyak diantara para pejuang An-Nushra yang memilih keluar dari ISIS dikarenakan sepak terjang ISIS cenderung keluar dari batasan syariat Islam.

Munculnya berbagai faksi dalam tubuh Salafiyyah, baik yang jihadis, politis maupun tradisional menunjukkan perbedaan pandangan kelompok Salafiyyah dalam pergolakan politik di Suriah. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai kepentingan yang melatarbelakangi berdirinya sejumlah faksi di tubuh Salafi. Persamaan mendasar antar seluruh faksi tersebut adalah sikapnya dalam membela Islam dan anti-Barat. Pemikiran-pemikiran gerakan Salafiyyah dapat ditelusuri dalam sejumlah karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Sedangkan Salafi reformis dengan tokohnya Jamaluddin Al-Qasimi dekat dengan kelompok Islam Moderat yang

Revolution in Syria, (Jordania: FES Jordan Published, 2013).

mendirikan NCSR dan dekat dengan Ikhwanul Muslimin.

Gerakan Islam lain yang juga berperan aktif dalam konflik adalah Al-Qaeda. Sejak awal revolusi Suriah, Al-Qaeda menjadi salah satu bagian aktor internal dalam konflik Suriah. Revolusi Suriah yang diawali dengan aksi damai pada awalnya tidak menghendaki lahirnya berbagai gerakan militer. Gerakan protes lebih didasari oleh perasaan untuk tegaknya kebebasan, keadilan dan demokrasi. Namun, sikap represif rezim memicu munculnya aksi kekerasan di Suriah. Kekerasan tersebut juga memicu transformasi berbagai gerakan dalam kelompok milisi bersenjata, seperti Al-Qaeda dan Salafi Jihadis. Kekacauan politik di Suriah pun telah mendorong lahirnya gerakan Islam lainnya yang lebih radikal. Pada April 2013, muncul gerakan Negara Islam di Iraq dan Suriah atau *Da'isy*, sebagai upaya dari pimpinan *Daulah Islamiyyah fi Al-Iraq*, Abu Bakar Al-Baghdadi untuk menggabungkan gerakannya dengan *Jabhat An-Nushra* di Suriah yang diklaim sebagai bagian dari gerakannya. Sejak saat itu *Daulah Islamiyyah fi Al-Iraq* berubah nama menjadi *Da'isy* atau yang lebih dikenal oleh AS dan Barat sebagai ISIS. Disamping itu, keterlibatan aktor regional dan internasional dalam konflik serta dibukanya perbatasan Turki, Lebanon dan Irak mendorong masuknya gerakan milisi bersenjata secara besar-besaran yang mengakibatkan konflik Suriah semakin kompleks.

2. Kepentingan Asing di Balik Konflik Suriah

Semakin meningkatnya konflik antara rezim Al-Assad dan kelompok oposisi terutama kelompok Islam tidak lepas dari intervensi asing yang memiliki kepentingan di Suriah. Bagi AS, kekacauan politik di Suriah dianggap sebagai salah satu ganjalan kepentingan AS di Timur Tengah. Sejak partai Ba'ath berkuasa rezim Al-Assad lebih cenderung untuk bekerjasama dengan negara-negara "Merah" seperti Rusia dan Cina. Suriah pun menjadi ancaman besar bagi Israel selain nuklir Iran. Nasionalisme Arab yang dikumandangkan rezim militer Suriah sejak tahun 1967 menjadi ganjalan bagi Israel dalam menancapkan hegemoninya.

Sementara itu, dukungan Iran terhadap rezim Al-Assad pun semakin terlihat dalam setiap kebijakan luar negerinya. Pemerintah Bashar Al-Assad yang dibangun melalui kekuatan politik partai Baath dengan dominasi kelompok Syiah Alawiyyah telah mendorong kekuatan Syiah lainnya untuk berkonfrontasi di Suriah, termasuk Hizbullah. Disamping itu, dukungan Iran terhadap keberlangsungan rezim Al-Assad tidak lepas dari posisi Suriah sebagai aliansi strategis Iran dalam menghadapi Israel. Suriah melalui ideologi Nasionalisme Arab, bersama Mesir dan Yordania pernah melakukan perlawanan menentang penjajahan Israel di Palestina pada tahun 1967. Suriah pun menjadi kepanjangan tangan Iran dalam menyokong milisi Hizbullah di Lebanon Selatan sejak tahun 1975.

Turki, Arab Saudi dan Qatar adalah negara-negara yang kerap menekankan pentingnya pergantian rezim di Suriah. Kendati tidak bersinggungan secara langsung, Turki menjadi penyokong utama kelompok oposisi di Suriah. Di samping itu, Turki mempunyai kepentingan dengan kelompok Islam di Suriah dalam memberantas milisi Kurdi di daerah perbatasan. Demikian halnya dengan Arab Saudi dan Qatar yang menjadi pendukung kelompok oposisi Islam. Kedua negara tersebut menjadi aktor penting dalam sejumlah konferensi perdamaian antara rezim Assad dengan kelompok oposisi. Dibekukannya keanggotaan Suriah dalam Liga Arab pada 2012 tidak lepas dari peran Arab Saudi dan Qatar. Selain memberikan sumbangan dana besar bagi oposisi, Saudi Arabia dan Qatar menjadi pemasok utama senjata kelompok oposisi untuk melawan rezim Al-Assad yang didukung Syiah Alawiyyah. Konflik yang terjadi pun dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menyulut api permusuhan antar kekuatan politik Islam Sunni dengan kekuatan politik Syiah.

Politik Islam, Otoritarianisme-Militer dan Krisis Legitimasi di Aljazair

Aljazair adalah negara di Afrika Utara yang memiliki dinamika politik Islam yang menarik. Sejarah konflik antara rezim militer dan gerakan Islam dimulai sejak era kemerdekaan dan semakin memuncak pada liberalisasi politik pada tahun 1990-an. Peran militer sangat

diuntungkan sebagai penguasa negara dengan sistem pemerintahan tunggal dimana seluruh aktivitas kenegaraan dikendalikan oleh rezim militer. Munculnya kekuatan politik Islam di Aljazair memberikan sinyal positif bagi perkembangan demokrasi di Aljazair yang semakin meningkat seiring terjadinya *Arab Spring* di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara.

Berbagai strategi dilakukan rezim militer untuk meredakan meluasnya protes rakyat dan perlawanan dari gerakan Islam, antara lain dengan memotong bea pajak, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan melakukan langkah reformasi politik dengan merombak kabinet pada 2011. Namun, reformasi yang dilakukan tersebut tidak menyentuh peran militer yang dianggap penting dalam perubahan politik di Aljazair. Kebijakan reformasi politik sulit dilakukan karena beberapa hal, antara lain, pertama, Abdelaziz Bouteflika, presiden Aljazair, melakukan respons cepat dengan kebijakan-kebijakan populis untuk meredakan gejolak rakyat termasuk stimulus untuk meredakan krisis ekonomi. Kedua, publik Aljazair telah trauma dengan konflik politik yang berkepanjangan sepanjang tahun 1992-1998 yang banyak memakan korban hingga 200.000 jiwa.

Perubahan kabinet dan kebijakan yang responsif yang dilakukan Bouteflika dirasakan cukup untuk memperlihatkan itikad baik Bouteflika bagi publik Aljazair. Setidaknya pada pemilu legislatif 2012, suara partai utama pengusung Bouteflika, FLN, naik 72 kursi dari Pemilu Legislatif 2007 yang hanya memperoleh 136 kursi, sementara suara partai Islam semakin menurun. Meningkatnya suara FLN tidak menunjukkan keberhasilan Bouteflika, tetapi lebih disebabkan oleh menurunnya partisipasi politik yang mencapai 43.14% (9.34 Juta) dari total 21.65 juta rakyat Aljazair yang memiliki hak pilih. Selain itu, manipulasi sistem politik rezim dengan menetapkan *parliamentary threshold* sampai 5% di setiap distrik sangat menyulitkan partai-partai baru untuk bersaing. Hasil akhir perolehan suara menunjukkan masih dominannya partai-partai lama dimana partai FLN memperoleh 208 kursi, RND 68 kursi, GAA 49 kursi, FFS 27 kurs) dan Partai Buruh 24

kursi.¹⁷ Dengan demikian, komposisi parlemen Aljazair masih dikuasai oleh kekuatan politik lama yang semakin mengukuhkan pengaruh politik Bouteflika.

Berbeda dengan Pemilu Legislatif, tingkat partisipasi publik dalam Pemilu Presiden (Pilpres) sedikit lebih tinggi dan selalu diatas 50% sebagaimana pada Pilpres 1995 dengan tingkat partisipasi sebesar 74.90% sampai berangsur mengalami penurunan pada setiap penyelenggaraan Pilpres. Pilpres 2014 merupakan yang terendah dalam sejarah Pilpres Aljazair dengan tingkat partisipasi sebesar 51.7%. Pada Pilpres 2014, Abdel Aziz Bouteflika unggul dalam perolehan suara dengan 81.53% suara. Penurunan tingkat partisipasi politik publik tersebut menunjukkan tengah menurunnya dukungan rakyat Aljazair terhadap kepemimpinan Bouteflika. Rendahnya partisipasi politik publik tidak lepas dari kegagalan Bouteflika yang gagal melaksanakan janji reformasi pasca *Arab Spring* dan ketidakpercayaan publik akan kemampuan Bouteflika untuk melanjutkan roda pemerintahan karena faktor usia dan kondisi kesehatan.

Selain faktor manipulasi sistem Pemilu dalam Pilpres, kemenangan Bouteflika tidak dapat dilepaskan dari kuatnya relasi antara politik dan militer sehingga dinamika politik di Aljazair kerap dimonopoli oleh kekuasaan tunggal FLN-ALN serta berpotensi menciptakan sistem pemerintahan oligarkis yang mengeliminasi munculnya kekuatan-kekuatan politik alternatif di Aljazair sehingga menyebabkan terbentuknya negara dengan sistem partai tunggal.

1. Kekuatan Politik Islam di Aljazair

Seperti halnya Yaman, faktor Islam tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan sosial-politik di Aljazair dimana sejak lama Islam merupakan akar terbentuknya sosial-budaya masyarakat Aljazair yang kerap dijadikan alat untuk mencari legitimasi politik sepanjang pemerintahan Ahmed Ben Bella sampai Mohamed Boudiaf.

Hubungan antar pemerintah dengan kelompok Islam di Aljazair kerap mengalami pasang surut. Pada masa pemerintahan Ahmad

¹⁷ "Algeria Avoids Arab Spring", <http://carnegie-mec.org/2012/05/31/algeria-avoids-arab-spring>.

Ben Bella (1962-1965), hubungan negara dan kelompok Islam cukup harmonis. Berdirinya Al-Qiyam Al-Islamiyya dibawah pimpinan Hashemi Tidjani yang merupakan penerus Abd Al-Hamid ben Bedis, An-Nahdhah, memiliki hubungan dekat dengan Ben Bella yang berhaluan sosialis.¹⁸ Meski demikian, Hashemi berhasil mempengaruhi Ben Bella untuk mengeluarkan kebijakan penerapan kurikulum agama Islam di sekolah umum. Pada masa Hourari Boumedinne (1965-1979) hubungan antara pemerintah rezim militer dengan kelompok Islam justru berlangsung tidak harmonis, akibat sikap tegas Hourari terhadap gerakan Islam.

Penentangan rakyat terhadap pemerintah yang korup telah menumbuhkan benih perlawanan kelompok Islam dibawah pimpinan Abbasi Madani yang berpengaruh dan menjadi simbol perlawanan gerakan Islam terhadap rezim militer. Perlawan lebih ekstrim bahkan muncul melalui berdirinya *Mouvement Algerian Islamique Arme-MAIA* yang eksis sampai tahun 1987. Untuk meredakan gejolak anti pemerintah dari kelompok Islamis, Chadli Benjedid menetapkan kebijakan populis yang menunjukkan keberpihakannya terhadap Islam. Namun, politisasi Islam tersebut justru mendapat penolakan dari kalangan Islam sehingga menyebabkan gagalnya proyek Islamisasi Benjedid serta menyuburkan bangkitnya kekuatan politik Islam. Menguatnya politik Islam di Aljazair mendorong rezim untuk melakukan transformasi dan perubahan sosial yang memicu lahirnya liberalisasi politik yang cukup signifikan pada masa Benjedid.

Puncak dari liberalisasi politik dan kebangkitan politik Islam di Aljazair terjadi pada akhir tahun 1980-an yang ditandai dengan lahirnya *Islamic Salvation Front* (FIS). Dibawah pimpinan Abbasi Madani dan Ali Belhaj, FIS kemudian menjadi partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu Aljazair. Kemenangan FIS dalam Pemilu Legislatif 1991 tidak lepas dari dukungan yang kuat dari kalangan Islam di Aljazair. Sebelum berdiri, FIS sudah mempunyai basis massa terorganisi dalam sebuah wadah bernama Liga Dakwah atau

Rabitat Ad-Da'wah yang merupakan konsolidasi nasional kelompok dan organisasi Islam di Aljazair. Karenanya tidak mengherankan sejak awal berdiri sampai pemilu dukungan terhadap FIS semakin meningkat dengan jumlah massa pendukung hingga mencapai 600.000 sampai 800.000 partisan.¹⁹

Pada Pemilu lokal 1990, FIS memenangi 54.3% suara parlemen di 1.541 (*Asemblee Populaire Communale- APC*), di tingkat kabupaten memperoleh 5.987 kursi, sementara ditingkat provinsi memperoleh 57.4% suara atau 1.031 kursi. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat urban di perkotaan hingga FIS mampu mendulang suara hingga mencapai 90%.²⁰ Selain itu, kemenangan FIS juga disebabkan oleh fondasi organisasi FIS yang kuat dan identitas keislaman yang kental di negara tersebut bahkan berperan penting dalam gerakan kemerdekaan. Disamping itu, sekularisme yang berkembang serta buruknya ekonomi negara akibat ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup menjadikan FIS sebagai partai Islam yang populer.²¹

Kemengan FIS pada Pemilu 1991, mendorong mundurnya presiden Chadli Benjedid pada 11 Januari 1992 diikuti dengan pembubaran parlemen oleh Perdana Menteri Sid Ahmed Ghazali. Kekacauan politik pasca Pemilu 1991 berujung pada penangkapan puluhan ribu anggota FIS termasuk Abbasi Madani dan Ali Belhaj sampai pada akhirnya FIS dibubarkan dan dianggap ilegal oleh rezim militer pada tahun 1992.

Pada tahun 1992 banyak bermunculan organisasi sayap militer yang anti-pemerintah seperti group Muhammed Allal dan group Ahmed Al-Wad. Namun, Allal terbunuh kemudian digantikan oleh Abdel Haq Layada dan membentuk organisasi sayap militer baru bernama *Goupements Islamiques Armes* (GIA). Pada perkembangannya GIA memiliki orientasi politik yang berbeda dengan FIS yang

¹⁸ Ray Takeyh, "Islamism in Algeria: A Struggle between Hope and Agony," *Middle East Policy* Vol. 10, Issue 2, 2003, hlm. 62-75.

¹⁹ Frédéric Volpi, *Islam and Democracy: The Failure of Dialogue in Algeria*, (London: Pluto Press, 2003), hlm. 43.

²⁰ Salwa Ismail, *Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism* (New York: I.B. Tauris, 2003), hlm. 188.

²¹ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Bandung : Mizan, 2007).

lebih memilih berjuang melalui konfrontasi senjata. Perbedaan ideologi politik inilah yang mengakibatkan GIA dan FIS pada akhirnya sulit untuk disatukan sehingga mendorong FIS untuk mendirikan organisasi sayap militer lainnya, yaitu Tentara Pembebasan Islam atau AIS, *Armee Islamique du Salut* pada Juli 1994. Hadirnya AIS sebagai gerakan militer kedua memperburuk faksionalisasi politik dan melemahkan politik Islam di Aljazair. Konflik dan kontak senjata antara AIS dan GIA sering terjadi sepanjang 1994 hingga 1997.²²

Sementara itu, wajah-wajah politik Islam moderat juga hadir di Aljazair. Pada tahun 1995, muncul Mahfoud Nahnah yang merupakan satu-satunya calon presiden dari kelompok politik Islam melalui partai Harkat Mujtama' As-Silmi (MSP). Pembubaran FIS pada tahun 1992 menyebabkan semakin menguatnya perolehan suara MSP dan An-Nahdhah. Pada Pemilu Legislatif 1997, MSP dan An-Nahdhah masing-masing memperoleh 69 kursi dan 34 kursi di parlemen. Sementara pada Pemilu Legislatif tahun 2002 perolehan suara masing-masing 38 kursi dan 43 kursi (MRN), pada Pemilu Legislatif 2007 MSP naik kembali menjadi 52 kursi namun MRN kehilangan 40 kursi. Sedangkan Al-Nahdhah setelah ditinggalkan oleh Jaballah hanya mendapat 1 kursi pada Pemilu Legislatif 2002 dan 5 kursi pada 2007. Salah satu sebab naik turunnya suara partai Islam lebih disebabkan oleh peraturan rezim yang melarang penggunaan identitas Islam dalam undang-undang Partai Politik 1997. Disamping itu, adanya friksi internal partai antara MRN dan An-Nahdhah berdampak pada perolehan suara MRN yang semakin meningkat dalam pemilu Aljazair.

Meningkatnya suara MRN pun tidak lepas dari pengaruh sosok Ahmad Jaballah sebagai pendiri MRN. Kuatnya pengaruh Jaballah juga berpengaruh terhadap Pemilu Aljazair secara signifikan. Sistem pemilu internal di MRN membuat Jaballah harus meletakkan mandat sebagai presiden partai di tahun 2004 dan menyerahkannya pada Mohamed Boulahya pada 2007 sehingga menghambat Jaballah untuk

bermanuver pada Pemilu Legislatif 2007 dan menggugurkan peluangnya untuk berkontestasi pada pemilihan presiden 2009. Hal ini membuat Jaballah keluar dari partai yang didirikannya sendiri dan memboikot Pemilu Legislatif 2007 serta menyatakan akan kembali ke kancah politik dengan partai baru pada pemilu berikutnya, JDP (*Justice and Development Party*). Friksi antar kekuatan politik Islam inilah yang pada akhirnya menyebabkan tidak bersatunya partai-partai Islam di Aljazair.

Fenomena *Arab Spring* 2011, dijadikan oleh kelompok dan partai Islam sebagai momentum untuk menggalang persatuan. Pada Pemilu 2012 terjadi koalisi yang penting bagi perkembangan politik Islam di Aljazair dimana islah politik antara MSP, MRN, dan An-Nahdhah melahirkan kekuatan koalisi Islam yakni *Green Algerian Alliance* (GAA) pada 7 Maret 2012, sementara Abdallah Jaballah memilih untuk tetap pada *Justice and Development Party*. Koalisi ini didasarkan pada kesadaran politik Bouguerra Soutono yang telah gagal membangun koalisi Islam yang kuat pada masa Bouteflika.²³ Namun, reunifikasi ini dianggap hanya formalitas karena tidak disertai dengan penyatuan seluruh anggota fanatik dari masing-masing partai. Akibatnya, pada Pemilu Legislatif 2012 tidak menunjukkan tren yang positif dari suara GAA yang turun 11 kursi jika dibandingkan koalisi MSP, MRN, dan An-Nahdhah pada 2007 yang mencapai 60 kursi.

Sementara itu, pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin juga sangat kuat dalam dinamika politik di Aljazair. Kebijakan Islamisasi politik pada masa Ben Bela turut menyuburkan berkembangnya Ikhwanul Muslimin di Aljazair, dimana banyak sekolah-sekolah Aljazair yang menerapkan sistem pendidikan Islam dan merekrut guru-guru dari Mesir yang sebagian besar adalah pendukung IM. Guru-guru tersebut secara tidak langsung menjadi penghubung antar pemikiran dan ideologi IM di Mesir dengan Aljazair. Ideologi FIS yang dibangun berdasarkan hubungan solidaritas persaudaraan yang berbasis masjid merupakan hasil dari pengaruh kuat ideologi IM. Demikian juga dengan MSP, MRN

²² Lihat Mohamed M. Hafez, "Armed Islamist Movements and Political Violence in Algeria," *Middle East Journal*, Vol. 4, 2000, hlm. 572-591.

²³ "Algeria, Islamist, Parties Seek Political Alliance", <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/04/algeria-islamist-parties-seek-political-alliance.html#>.

dan An-Nahdhah yang memiliki sistem kaderisasi dan rekrutmen yang sama dengan IM.

Adapun pengaruh radikalisme yang muncul dalam tubuh MIA, GIA, AIS, GSPC dan LIDD tidak lepas dari pengaruh semangat juang para pejuang eks Perang Afganistan. Meskipun jumlah mereka sedikit namun, dapat memberikan semangat dalam mengorganisir melalui Al-Muwahhidun. Jaringan ini juga menyebabkan munculnya konsolidasi antara gerakan Islam di Aljazair dengan gerakan Islam garis keras seperti Al-Qaeda. Pada perkembangannya Al-Qaeda memiliki afiliasi yang kuat dengan para elite GIA, MIA maupun AIS. Relasi antara Al-Qaeda dan gerakan radikal di Aljazair pada akhirnya berdampak pada terbentuknya ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap masa depan demokrasi di Aljazair, khususnya AS dan Eropa yang memandang AQIM sebagai ancaman bagi keamanan regional.

Penutup

Munculnya kekuatan politik Islam seiring dengan berlangsungnya upaya demokratisasi dan liberalisasi politik seperti terjadi di beberapa negara kasus, antara lain, Yaman, Suriah, dan Aljazair adalah beberapa fenomena menarik yang terjadi dalam dinamika politik Timur Tengah saat ini. Valentine Colombo, pakar dan pengamat dari *European Foundation for Democracy* yang juga guru besar geopolitik dunia Islam Universitas Eropa di Roma bahkan sampai secara ekstrim menyatakan bahwa kekuatan politik Islam, seperti Ikhwanul Muslimin telah mengambil alih kekuasaan di kawasan Timur Tengah.

Meskipun demokrasi dipandang sebagai sistem yang ideal dalam konstelasi politik bernegara, namun tidak begitu saja dengan mudah dapat diaplikasikan dalam kehidupan bernegara di berbagai negara, termasuk di Yaman, Suriah, dan Aljazair. Demokrasi kerap berbenturan dengan persoalan lokal baik ekonomi, struktur sosial, tafsir agama dan budaya, maupun proses politik yang terjadi dalam suatu negara. Ditambah lagi dengan pengaruh eksternal yang tampaknya juga berpengaruh bagi berhasil dan atau gagalnya sebuah negara dalam mengimplementasikan sistem demokrasi.

Dalam konteks Timur Tengah, demokrasi oleh sebagian masyarakat di kawasan dipandang sulit untuk bersanding dengan ideologi Islam dengan alasan bahwa dalam demokrasi berdirinya negara bangsa (*nation state*) merupakan keharusan, sementara dalam pandangan Islam gagasan persatuan umat merupakan kewajiban untuk mencegah terjadinya polarisasi umat.²⁴ Namun, bagi kelompok Islam hal itu tidak senantiasa berseberangan dengan spirit demokrasi. Sebab pelibatan masyarakat (sebagai esensi demokrasi) dalam Islam sebenarnya bisa ditampung dalam prinsip-prinsip syuro serta bisa diakomodasi dalam tradisi ijthad baik melalui proses *ijma'* maupun *qiyas*. Konsep *ijma'* (konsensus) secara umum memang diputuskan berdasar pada berbagai pertimbangan dan pandangan dari berbagai elemen umat Islam dan dengan berbagai latar belakang. Prinsip ini dinilai satu lini dengan corak dan semangat demokrasi.

Dari sini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa konsepsi Islam sebenarnya memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam demokrasi, namun pada saat yang sama ada pula prinsip yang berbeda di antara keduanya.²⁵ Dua spektrum pandangan inilah yang pada akhirnya melahirkan multi interpretasi di kalangan Islam dalam konteks keduanya, bahkan acapkali melahirkan pergesekan antara dua pendapat, serta acapkali dijadikan komoditi politik untuk memperjuangkan kekuasaan atau sebaliknya untuk menjatuhkan sebuah kekuasaan.

Meskipun tren kekuatan politik Islam dalam realitas politik modern mulai bisa eksis bersama mekanisme demokrasi, namun masih banyak kekuatan politik yang masih phobia terhadap politik Islam. Realitas itu telah terbukti sejak awal 1990an dan masih bertahan hingga sekarang. Pada tahun 1991 misalnya, kekuatan politik Islam melalui FIS di Aljazair yang menang dalam pemilu demokratis telah diberangus oleh militer. Begitu juga kelompok Islam di Suriah yang dilarang melalui undang-undang pelarangan gerakan Islam yang mengakibatkan pembantaian banyak terjadi di wilayah dengan

²⁴ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, (New York : Free Press, 1992).

²⁵ John L. Esposito dan James P. Piscatori, "Democratization and Islam", *Middle East Journal* Vol. 45, No. 3, 1991.

basis kelompok oposisi Islam. Demikian di Yaman, dimana presiden dari kalangan militer Abdurrabu Manshur Hadi berhasil menang dalam Pemilu dengan calon tunggal, kendati pada akhirnya harus terusir oleh kelompok separatis Syiah Al-Houti. Realitas ini mengindikasikan adanya apa yang disebut “*backward bending process*” (proses pembalikan kembali) ke arah rejim otoritarian.

Jika dicermati fenomena tersebut tampaknya bukan semata-mata faktor internal, melainkan juga faktor eksternal yang ikut melegitimasi, yang terjadi bukan saja dalam kasus (Tunisia, Mesir, dan Libya) tetapi masih tetap terjadi pada kasus di negara lainnya, dimana dunia seolah bungkam terhadap kentalnya peran faktor eksternal, seperti dalam kasus Yaman (terkait sektarianisme) dengan adanya keterlibatan Arab Saudi, AS, dan GCC yang berpengaruh dalam dinamika politik Yaman, sementara di Suriah, selain konflik sektarianisme dan ISIS, peran negara-negara seperti AS, Rusia, Iran, dan negara-negara Teluk menjadikan konflik semakin terinternasionalisasikan. Begitu juga di Aljazair, dimana sindrom budaya Perancis masih berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial-politik rakyatnya. Dari sini tampaknya sulit untuk membantah betapa faktor eksternal ikut menghambat proses tumbuhnya demokrasi di negara-negara tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Haj, Abdurrahman 2012. *Ad-Da'wah wal Jama'ah, At-Tathallu'at lil Jama'at Ad-Diniyyah fi Suria*. Suriah: Al-Markaz At-Tawasul wa Abhats As-Stratijiyah.
- Al-Yemeni, A. A. H. 2003. *The Dynamics of Democratization: Political Parties in Yemen*. Bonn: Freidrich Ebert Stiftung.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- Hinnebusch, Raymond A. 2001. “Syria,” dalam Shereen C. Hunter (Ed.). *The Politics of Islamic Revivalism Diversity and Unity*. Indiana University Press.
- Hunter, Sheeren T. 2001. *Politik Kebangkitan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja.
- Ismail, Salwa. 2003. *Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism*. New York: I.B. Tauris.
- Perlmutter, Amos. 1981. *The Roles of Military and Rules Politis*. London: Frank Cass and Company Limited.
- Phillips, Sarah. 2008. *Yemen's Democracy Experiment in Regional Perspective: Patronage and Pluralized Authoritarianism*. New York: Palgrave Macmillan.
- Rumman, Mohammad Abu. 2013. *Islamists, Religion, and the Revolution in Syiria*. Jordania: FES Jordan Published.
- Sihbudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Tambukara, Apriadi. 2011. *Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Narasi
- Volpi, Frédéric. 2003. *Islam and Democracy: The Failure of Dialogue in Algeria*. London: Pluto Press.

Jurnal

- Enhaili, Aziz and Adda Oumelkheir. 2003. “State and Islamism in the Maghreb.” *Meria Journal*.
- Esposito, John L. dan Piscatori, James P. 1991. “Democratization and Islam”. *Middle East Journal* Vol 45, No 3.
- M. Hafez, Mohamed. 2000. “Armed Islamist Movements and Political Violence in Algeria.” *Middle East Journal* Vol. 4.
- Takeyh, Ray. 2003. “Islamism in Algeria: A Struggle between Hope and Agony.” *Middle East Policy* 10 (2).

Surat Kabar dan Website

- Campbell, Leslie. “Yemen The Tribal Islamists”. <http://www.wilsoncenter.org/islamists/yemen-the-tribal-islamists>.
- “Human Development Index and Its Components”. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table1_reprint.pdf
- Succarieh, Mouna. “Rise of Radical Islam in Yemen Altering Its Tribalism”. Diterjemahkan oleh Rani Geha. <http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/09/weekenda-detailed-look-at-islamism-in-yemen.html#>.
- “The Failed States Index 2012”. http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive.